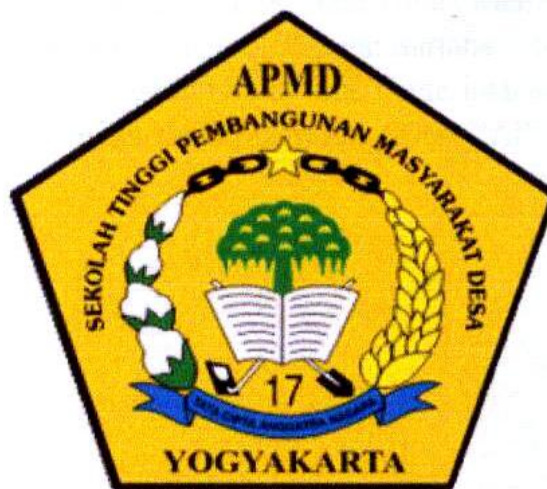


**PARTISIPASI POLITIK KAUM DIFABEL DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**SITI HANDAYANI  
13520036**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**



**PARTISIPASI POLITIK KAUM DIFABEL DALAM PEMILIHAN**

**WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)  
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**





## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 27 Maret 2018  
Waktu : 10:00 s/d 11:30 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama Tanda Tangan

1. Drs. Parwoto, M.Si  
Ketua Penguji/ Dosen Pembimbing

2. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si  
Penguji Samping I

3. Drs. Sumarjono, M.Si  
Penguji Samping II



## MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

*-(Q.S Ar-Ra'd:11)-*

“Esensi menjadi manusia adalah ketika seseorang tidak mencari kesempurnaan”

*-(George Orwell)-*

“Dan aku tidak katakan cinta yang membelenggu kesadaran dan kebebasan, dan aku memilih cinta yang membebaskan”

*-(Hussein-Analies)-*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi strata (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa.

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua saya yang tersayang, Bapak Darsuli dan Ibu Siti Sukaisih yang selama ini selalu berusaha mendukung, memeberikan semangat, mendidik, membiayai dari segala kebutuhan dalam proses menempuh pendidikanku, dan tentunya tidak henti-hentinya selalu memndoakanku.
2. Untuk Orang Tua Kedua saya yang tersayang, Bapak Barmin dan Ibu Wagiyah yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam proses studiku.
3. Untuk Adik saya Indah Kurniasih yang selalu memberikan doa dan semangat dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.
4. Seluruh anggota keluargaku yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat dalam proses mengenyam pendidikan jenjang sarjana.
5. Untuk teman terdekat saya Piee, yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dalam proses penyelesaian skripsiku. "Thank you for everything, you're best my partner in crime"
6. Sahabat- sahabat tersayang angkatan 2013, intan, wulan, ibnu, singgih, firdaus, candra, dewi mendes, arlin mendes, rahman, gaspar, toby, sapri, charly yang selama ini telah memberikan doa, dukungan, dan semangat yang luar biasa serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Kakak- kakak tersayang, kakak ayu matilda, kakak tanty megu, kakak eci, kakak jen, kakak van hami, yang selama ini telah memberikan doa, dukungan, dan semangat yang luar biasa serta kakak-kakak tersayang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Almamater tercinta STPMD "APMD" Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan Rahmat dan Kasih-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) tanpa ada halangan yang berarti guna menyelesaikan studi dan menempuh gelar sarjana strata (S-1) di Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai akademisi, untuk mendapatkan gelar sarjana di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Dengan judul skripsi Partisipasi Politik Kaum Difabel Dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017.

Dalam tulisan ini, penulis menyadari telah banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan penulis sendiri, dan bagi penulis ilmiah dimasa mendatang untuk lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa dukungan dari beberapa pihak.

Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos , M.Si. Selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta,
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan,
3. Bapak Drs. Parwoto, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi,
4. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si. Selaku Dosen Penguji,
5. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si. Selaku Dosen Penguji,

6. Seluruh Staf Karyawan/i STPMD “APMD” Yogyakarta,
7. Seluruh Staf KPU Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta, Panwaslu Kota Yogyakarta, Lembaga SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Kaum Difabel),
8. Ibu Widi Hartanti, Selaku Aktifis Perempuan Kaum Difabel
9. Tokoh Difabel (Tuna Netra, Rungu, dan Wicara)
10. Seluruh keluargaku yang kucintai dan ku sayangi, selaku sponsor dalam hidup.
11. Seluruh Keluarga Besar Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 April 2018

Penulis,

Siti handayani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN. ....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
SINOPSIS .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
1. Partisipasi Politik .....	7
2. Penyandang Disabilitas .....	19
3. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) .....	30
F. Ruang Lingkup .....	39
G. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Unit Analisis .....	41



H. Teknik Pengumpulan Data.....	42
I. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB II PROFIL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA</b>	<b>49</b>
A. Selintas Tentang Kota Yogyakarta.....	49
B. Kedudukan, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta .....	53
C. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta	56
D. KPU Kota Yogyakarta Dalam Mengelola Partisipasi Pemilih Difabel Pada Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017 .....	67
4. Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017 .....	71
<b>BAB III ANALISIS PARTISIPASI POLITIK KAUM DIFABEL DALAM PEMILIHAN WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 .....</b>	<b>77</b>
A. Deskripsi Informan .....	77
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Usia. ....	77
2. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin. ....	78
3. Deskripsi Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir. ....	79
4. Deskripsi Informan Berdasarkan Instansi .....	80
5. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	81
B. Deskripsi Informan Berdasarkan Berdasarkan Pekerjaan.....	82
1. Akses Kaum Difabel Dalam Tahapan Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017 .....	82
2. Voice Kaum Difabel Dalam Tahapan Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017 .....	98

3. Control Kaum Difabel Dalam Tahapan Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017 .....	109
BAB IV PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hirarki Partisipasi Politik.....	16
Tabel 1.2	Bentuk- bentuk Partisipasi Politik.....	19
Tabel 1.3	Klasifikasi Penyandang Difabel.....	23
Tabel 2.1	Daftar Walikota Yogyakarta Dari Masa Ke Masa .....	50
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Yogyakarta Berdasarkan Usia. ....	64
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Yogyakarta Berdasarkan Pangkat/ Golongan.....	64
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan. ....	65
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat KPU Kota Yogyakarta..	66
Tabel 2.7	Daftar Pemilih Tetap Penyandang Difabel Putaran 1 Pilkada Walikota Yogyakarta Serentak Tahun 2017. ....	72
Tabel 2.8	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Difabel Kota Yogyakarta tahun 2017.....	74
Tabel 3.1	Identitas Informan Bedasarkan Usia. ....	77
Tabel 3.2	Identitas Informan Bedasarkan Jenis Kelamin.....	78
Tabel 3.3	Identitas Informan Bedasarkan Pendidikan Terakhir.....	79
Tabel 3.4	Identitas Informan Bedasarkan Instansi. ....	80
Tabel 3.5	Identitas Informan Bedasarkan Pekerjaan.....	81

## INTISARI

Partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan dalam pemilu. Pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Yogyakarta mutlak dibutuhkan partisipasi politik dari seluruh masyarakat termasuk juga dari para penyandang disabilitas. Sebelumnya dalam pemilihan umum para penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas kurang diperhatikan keberadaannya. Selain itu juga para penyandang disabilitas pun kurang aktif dalam berpartisipasi di setiap kegiatan pemilu yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta mulai dari proses tahapan persiapan sampai tahapan pelaksanaan. Atas dasar itulah peneliti tertarik menyusun skripsi dengan judul “PARTISIPASI POLITIK KAUM DIFABEL DALAM PEMILIHAN WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017”. Rumusan masalah adalah Bagaimana Partisipasi Politik Kaum Difabel dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017? Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017.

Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian yang lebih menekankan teknik interpretasi data untuk menemukan makna atau arti yang terkandung di balik situasi sosial. Metode ini cocok dipakai bagi peneliti yang hendak mencari tahu makna atau arti yang ada di balik situasi sosial yang terjadi. Dalam skripsi ini, penyusun hendak meneliti partisipasi politik kaum difabel dalam pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Obyek Penelitian ini tentang Partisipasi Politik Kaum Difabel dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017. Subyek penelitian yaitu KPU Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta, Panwaslu Kota Yogyakarta, Lembaga Sasana Advokasi Dan integrasi Kaum Difabel (SIGAB), Aktivis Perempuan Difabel, dan tokoh difabel. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui penyandang difabel telah berpartisipasi dalam pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Partisipasi ini dilihat dari *access*, *voice*, dan *control*. *Access*, Kaum difabel memiliki akses dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Hal ini terlihat ketika kaum difabel terlibat dalam setiap sosialisasi tentang pemilihan Walikota Yogyakarta yang dilakukan oleh KPUD Kota Yogyakarta. Selain itu, kaum difabel memberikan hak politik, yakni hak suara mereka dalam pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. *Voice*, partisipasi kaum difabel dalam mengikuti proses tahapan pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017 masih lemah bersifat pasif, hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang mau berpartisipasi dalam memberikan *voice* pada saat proses tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. *Control*, pemilihan penyandang difabel dalam pengawasan dilakukan dengan mengawasi secara langsung dan dilakukan secara tidak langsung. *Control* yang diberikan pada tahapan pemilu masih rendah dan bersifat pasif. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala, yakni akses informasi yang belum merata, kesadaran politik masih rendah, dan terkait mobilitas. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan, penyelenggara pemilu hendaknya juga lebih terbuka dengan ide-ide inovatif terkait sistem dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif untuk dapat memastikan peningkatan partisipasi semua masyarakat dalam pemilu mendatang. Penyandang difabel perlu lebih terlibat aktif dalam setiap tahapan pemilu, khususnya terlibat sebagai penyelenggara di berbagai tingkatan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilu juga merupakan elemen penting untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, karena Pemilu menjadi sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam hal memilih siapa yang akan menjadi perwakilan mereka di pemerintah. Hal ini bertolak dari pemahaman bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan rakyat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pimpinan. Oleh sebab itu, keikutsertaan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari tanggung-jawab mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena partisipasi politik masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi sangat penting sebab legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, pada tanggal 15 Februari 2017 telah

diselenggarakannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan secara serentak yang didikuti oleh 101 daerah di Indonesia dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Salah satu dari daerah yang menyelenggarakan Pilkada ialah Kota Yogyakarta yakni pada pemilihan wali kota Yogyakarta. Pemilihan Wali Kota di Kota Yogyakarta merupakan proses rekrutmen politik yang merupakan penyeleksian masyarakat Kota Yogyakarta terhadap tokoh-tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, dimana seluruh masyarakat Kota Yogyakarta memiliki hak serta kebebasan yang sama untuk memeberikan hak politiknya kepada calon-calon yang akan dipilihnya. Dalam Pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 tentunya diselenggarakan berdasarkan pada Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana kepala daerah dipilih untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada pelaksanaan Wali Kota Yogyakarta yang diselenggarakan belum lama ini, tentunya sangat mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat termasuk juga partisipasi dari para penyandang disabilitas yang juga mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memberikan hak politiknya. Difabel sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Kaum Difabel juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama, sebagaimana diatur



dalam Undang- undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Namun kenyataannya hak- hak kaum disabilitas dalam partisipasi politik masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang bisa membantu mereka dalam mengikuti tahapan-tahapan pemilu, Mulai dari tahapan persiapan, masa kampanye, masa pencoblosan sampai pra-pemilu yang mengakibatkan kurang tersalurkannya aspirasi kaum disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang tentunya juga memiliki hak pilih yang sama. Seperti yang diberitakan di dalam surat kabar online jogjnews.com tanggal 28 Mei 2016 yang diakses pada tanggal 27 Maret 2017, hak politik penyandang disabilitas masih terabaikan, masih terdapat diskriminatif untuk kaum difabel. Selain itu, aspek teknis pelaksanaannya bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para kontestan Pemilu itu sendiri. Boleh dikatakan bahwa kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas baik bagi para pelaksana, pengawas, maupun pesertanya jauh di bawah standar. Implikasinya, hambatan-hambatan mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas seperti hambatan teknis, informasi, dan mental masih tak mampu diruntuhkan walau aspek legalnya telah didukung lewat regulasi yang dibuat. Meskipun KPU telah membuat aturan-aturan yang diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilu tetapi pada kenyataannya hak berpolitik penyandang disabilitas masih dikesampingkan, masyarakat lainnya ataupun petugas di TPS terkadang masih kurang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini mengakibatkan pemenuhan hak politik para penyandang

disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia selalu diwarnai dengan kendala dan permasalahan. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi: hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, dan hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain ketiga pokok hak penyandang disabilitas di atas terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam pemilu yaitu, saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya.

Selain itu kurangnya transparansi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyandang disabilitas serta jumlah dan posisi penyandang disabilitas banyak yang tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh keengganan petugas pendata untuk menanyakan jenis disabilitas kelompok yang di data. Menurut *Institute For Research And Empowerment (IRE)* Yogyakarta partisipasi penyandang disabilitas kota Yogyakarta terendah dalam hal partisipasi dalam pemilu yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Yogyakarta. (IRE, 2015) Berdasarkan hasil riset yang diselenggarakan IRE bekerja sama dengan pihak KPU kota Yogyakarta pada bulan Juli 2015 penyebab rendahnya partisipasi penyandang difabel disebabkan kurangnya sosialisasi terkait dengan partisipasi difabel dalam pemilu, persiapan KPU yang kurang berdampak pada pelaksanaan di lapangan, belum ada metode sosialisasi yang dikhususkan bagi kelompok difabel, akses dan ruang pada saat pemilu belum ramah terhadap penyandang

difabel, Permasalahan data jumlah pemilih disabilitas juga belum terdata dengan jelas.

Meskipun demikian bukan tidak mungkin penyandang disabilitas ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik dalam pemilu sepanjang ada keinginan yang kuat dan ditunjang akses serta fasilitas yang baik. Karena, salah satu indikator peradaban suatu bangsa adalah apabila derajat aksesibilitas untuk para difabel semakin bagus. Artinya, kemudahan bagi kaum difabel dalam mewujudkan kesamaan dalam segenap aspek kehidupan dan penghidupan semakin membaik. Namun demikian, tak bisa dipungkiri bahwa saat ini kaum difabel masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Padahal hak kaum difabel dalam berpolitik sebenarnya telah dijamin oleh undang-undang dimana salah satunya ialah setiap warga negara diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suara dalam pemilu.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah seperti di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)- Wali Kota Yogyakarta Tahun 2017”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Partisipasi Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) -Wali Kota Yogyakarta Tahun 2017 ?

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Althoff, Michael Rush dan Phillip. 2005. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (Hal:147)
- Amalia, Haris, Nuryanti, Romli, dan Darmawan. 2016. Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis, Proses, dan Hasil. Jakarta: Pustaka Pelajar. (Hal:67-70)
- Andrew, Mochtar Mas'ood dan Collin Mac. 2003. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. (Hal:43-48)
- Henry Subiakto, dan Rachmah Ida. 2014. Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi. Prenamedia Group.
- Macridis, Roy dan Brown, Bernard. 1992. Perbandingan Politik. Jakarta. Erlangga.
- Maran, Rafael Raga. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta. (Hal:147)
- Moleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. (Hal:43-47)
- Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. (Hal: 28-32)
- Nurul, Zuriah. 2007. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori – Aplikasi). Jakarta: PT Bumi Aksara. (Hal:47-52)
- Rahman, Arifin. 2002. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: SIC.
- Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta (Hal:12-20)
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo. (Hal:140)
- Eko, Sutoro. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD) dan ACCES. (Hal:9)

### **Literatur Lainnya :**

#### **Undang- Undang :**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Penyandang Disabilitas.

Peraturan Walikota Yogyakarta No 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

#### **Skripsi :**

Syahrizal Djawa (11520019). 2015. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014*, STPMD “APMD”, Yogyakarta.

Fransiskus Xaverius Oden (10522317). 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Langsung*, STPMD “APMD”, Yogyakarta.

#### **Internet :**

Bambang, Rustanto, 2013, Konsep disabilitas,

(sumber:<http://bambang-rustanto.blogspot.co.id/2013/08/konsep-disabilitas.html>). Diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

Sindonews:Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam politik (<http://nasional.sindonews.com/read/874222/18/partisipasi-penyandang-disabilitasdalam-politik-2014-1402980880>). Diakses pada tanggal 20 Mei 2015.

Syahidi, Syukron, 2014, Pengertian dan Istilah Anak ABK,

(<http://izzaucon.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-dan-istilah-anak.html?m=1>). Diakses pada tanggal 17 April 2017.